

ANALISIS UJI KAUSALITAS PENERIMAAN PAJAK DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRANGER TAHUN 1978-2003

Sarastika Indrawati¹

Daryono Soebagiyo¹

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: dsoebagy@yahoo.com

ABSTRACT

This research aim is to analyse relation pattern between tax income (Tx) with government expenditure (G) in Surakarta. Referring to that made hypothesis that tax income have causality with government expenditure.

This research uses time series data with period of year 1978 - 2003. Analysis result mention that there is causality unidirectional/one way pattern of tax income to government expenditure in Surakarta. It is mean that the increasing of tax income push government expenditure. But, the increasing of government expenditure will not push tax income in Surakarta.

Keywords: *tax income, government expenditure, granger causality*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan Negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, peranannya dalam membiayai kegiatan belanja diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga APBN menjadi berimbang dalam tahun 2004. Hal ini berarti bahwa semua belanja negara dapat dibiayai dari pendapatan negara. Hibah merupakan sumber belanja yang relatif sulit untuk diharapkan dan diperkirakan keberadaannya selanjutnya mengingat penerimaan bukan pajak relatif kurang stabil dalam menjamin pendapatan negara keterkaitannya pada kondisi eksternal secara signifikan, maka

upaya peningkatan pendapatan negara lebih diharapkan dari sisi penerimaan perpajakan, tanpa meninggalkan program pengembangan penerimaan bukan pajak.

Dalam teori keuangan negara dikenal satu prinsip yang menjiwai pelaksanaan desentralisasi, yakni *finance should follow function* (Musgrave, 1994). Prinsip ini mempunyai makna perlu ada kejelasan mengenai fungsi/kewenangan pemerintah terlebih dahulu sebelum sumber keuangan untuk pembiayaan fungsi tersebut diserahkan. Terkait dengan apa yang telah diungkapkan di atas, UU no.22/1999 tentu saja harus jelas terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh UU No.25/1999 sebagai konsekuensi logisnya. Dengan kata lain distribusi kewenangan antara pemerintah

pusat dan daerah yang diatur oleh UU No. 22/1999 dan peraturan pendukungnya haruslah jelas dan lengkap batasannya agar penentuan jumlah dana atau sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas/kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Di negara maju seperti Amerika Serikat, pemerintah daerah di sana juga menjalankan tugas-tugas yang sifatnya umum (*public*) yang sedikit sekali kemungkinannya diselenggarakan oleh pihak swasta. Pada sisi pengeluarannya, pemerintah daerah di Amerika Serikat menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagai kegiatan yang menyedot sekitar 33% pengeluaran total pemerintah daerah, diikuti oleh sektor kesejahteraan sosial, pembuatan dan pemeliharaan jalan raya (8,5%), serta pemeliharaan kesehatan masyarakat (6,7%), dan *utility* (6,5%). Sedangkan pada sisi pendapatannya tampak bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah yang utama berasal dari pajak kekayaan yaitu 19,7% dari total pendapatan pemerintah daerah pada tahun 1975. Kemudian diikuti dengan pendapatan dari pajak penjualan dan cukai (19%), pungutan lain (20,3%), dan subsidi pemerintah pusat (18%). Dalam hal ini tampak bahwa dengan kecilnya persentase subsidi pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah berarti pemerintah pusat tidak begitu banyak mencampuri urusan daerah sehingga lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan sistem pemerintahan di negara sedang berkembang, khususnya di Indonesia (Suparmoko, 2001: 27-29).

Pajak adalah pungutan oleh negara kepada penduduknya yang didasarkan pada undang-undang perpajakan, bersifat dapat dipaksakan dan bagi pembayarannya tidak diberikan kontrapresepsi secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi ekonomi yaitu, Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), Fungsi Pengaturan (*Regulator*), dan Fungsi Distribusi. Berkaitan dengan fungsi penerimaan, pajak dikenakan dengan tujuan untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah atau pengeluaran pemerintah.

Berbagai macam Pengeluaran Rutin yang dilakukan Pemerintah seperti, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Subsidi dan lain-lain dibiayai oleh Penerimaan Negara. Terutama dari Penerimaan Pajak yang berasal dari Pajak Pendapatan Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan Ekspor dan Impor, Pajak Bea Masuk, Cukai dan lain-lain. Semakin besar jumlah pajak yang diterima Pemerintah akan berakibat terhadap meningkatnya pendapatan yang diterima Pemerintah untuk membiayai Pengeluaran Pemerintah, dimana akan memberikan pengaruh terhadap lancarnya kegiatan Pemerintah. Sebaliknya menurunnya penerimaan pajak yang diterima, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran dengan menggunakan sumber-sumber penerimaan negara yang lain untuk membiayai berbagai Pengeluaran Pemerintah (Sutrisno, 1983).

Dalam teori perkembangan Pengeluaran Pemerintah yang dikemukakan oleh *Peacock dan Wiseman* mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan Penerimaan Pemerintah yang semakin besar (Guritno, 1994).

Pajak digunakan sebagai sumber dana atau sarana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan dan bila ada sisi (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Sumbangan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri diharapkan meningkat dari tahun ke tahun, untuk

mendukung tercapainya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berimbang. Kondisi tersebut perlu disadari oleh masyarakat khususnya para pengambil keputusan di bidang fiskal, untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil berbagai langkah kebijakan.

Sejak tahun 1967 RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus untuk tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada 1 April dan berakhir 1 Desember. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, seperti yang pernah dijalankan sebelum tahun anggaran 1967/1968 (Suparmoko, 2001: 26). Dalam Undang-

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Surakarta 1998/1999 – 1999/2000

Rincian	1998/1999 (Milyar Rp)	1999/2000 (Milyar Rp)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN	20.853,87	28.431,02	36,33
1. Sisa lebih Perhitungan tahun lalu	500,59	1.190,55	137,83
2. Pendapatan Asli Daerah	2.323,13	2.790,71	20,13
3. Pendapatan dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	17.862,91	24.362,03	36,38
4. Pinjaman Pemerintah Daerah	167,24	87,73	-47,54
PENGELUARAN	19.624,11	27.070,10	37,94
A. Rutin	13.354,13	18.641,84	39,60
1. Belanja Pegawai	9.903,28	14.052,52	41,90
2. Belanja Barang	1.297,88	1.721,48	32,64
3. Biaya Pemeliharaan	281,97	356,41	26,40
4. Belanja Perjalanan Dinas	154,00	200,94	30,48
5. Belanja Lain-lain	964,52	1.177,13	22,04
6. Anggaran Pinjaman/Hutang	115,78	128,43	10,39
7. Ganjaran/subsidi/sumbangan	245,61	360,01	46,58
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lainnya	294,71	470,81	59,75
9. Pengeluaran tidak tersangka	96,38	174,11	80,65
B. Pembangunan	6.269,98	8.428,26	34,42

Sumber : Bagian Keuangan Kota Surakarta

undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah (pusat) di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan terhadap masyarakat, pengelolaan kekayaan negara serta pemanfaatan sumber daya alam.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, rumusan penelitian yang dikemukakan di sini adalah bagaimanakah kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Kota Surakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Kota Surakarta.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya diduga bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah.

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan aktifitas Pemerintah, kebutuhan akan penerimaan Negara menjadi semakin mendesak. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan adanya program ini diharapkan peningkatan penerimaan pajak lebih besar lagi (Guritno, 1995).

Pajak adalah pungutan oleh negara kepada penduduknya yang didasarkan pada undang-undang perpajakan, bersifat dapat dipaksakan dan bagi pembayarinya tidak diberikan kontraprestasi secara langsung. Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi ekonomi yaitu fungsi penerimaan (*Budgetair*), fungsi pengaturan (*Regulated*), fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

Penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai macam pungutan (*charges*), ataupun pinjaman pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi Pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji Pemerintah untuk membayar kembali pada suatu hari pada masa mendatang, serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Pajak merupakan suatu kewajiban.

Pada umumnya penerimaan-penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Karena penerimaan bukan dari pajak relatif kurang stabil dalam menjamin pendapatan negara keterkaitannya pada kondisi eksternal secara signifikan, maka upaya peningkatan pendapatan negara lebih

diharapkan dari sisi penerimaan perpajakan, tanpa meninggalkan program pengembangan penerimaan bukan pajak (Sutomo, 2003).

Kita juga harus memperhatikan perbedaan yang sering digunakan yaitu antara pajak langsung (*Direct Taxes*) dan pajak tidak langsung (*Indirect Taxes*). Karena perbedaan ini, maka kebanyakan penulis mendefinisikan pajak langsung sebagai pajak yang pertama dikenakan pada rumah tangga ataupun perseorangan yaitu yang memikul beban tersebut. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada beberapa titik pembebanan lainnya, tetapi dimaksudkan untuk dialihkan kepada siapa saja yang harus menjadi pihak penanggung akhir dari beban pajak tersebut. Pajak perseorangan seperti, pajak penghasilan perseorangan, dengan demikian merupakan pajak langsung dan hampir semua pajak *in-rem* (seperti, pajak penjualan atau cukai), merupakan pajak tidak langsung. Istilah pajak cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung dan diterapkan terhadap pajak penjualan barang-barang manufaktur tertentu. Berdasarkan undang-undang, pajak langsung harus dikenakan atas dasar penduduk sedangkan jenis pajak lain seperti, bea, beban dan cukai tidak perlu (Musgrave, 1993).

Penerapan Pajak Berdasarkan Manfaat Umum dan Manfaat Khusus

1. Penerapan pajak berdasarkan manfaat umum

Dalam definisi yang ketat mengenai prinsip manfaat disebutkan bahwa setiap wajib pajak akan dibebani pajak sesuai dengan permintaannya terhadap jasa-jasa publik. Karena setiap orang mempunyai preferensi terhadap jasa publik yang berbeda-beda,

maka tidak ada rumusan umum yang berlaku untuk semua orang. Setiap wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan hasil evaluasi terhadap masing-masing wajib pajak tersebut. Meskipun demikian ada beberapa pola yang dapat kita kenali. Telah kita ketahui bahwa jenis barang-barang pribadi yang dibeli akan bervariasi sesuai dengan tingkat pendapatan setiap rumah tangga. Pola yang sama juga diharapkan berlaku untuk barang-barang sosial. Namun, dengan mengesampingkan kenyataan bahwa jumlah barang yang dibeli (pada harga yang sama) akan bervariasi sesuai dengan pendapatan, maka sekarang kita akan bertanya berapa harga yang ingin dibayar oleh berbagai konsumen untuk jumlah barang yang sama. Kecuali jika barang sosial tersebut bersifat inferior (*Inferior Goods*) bisa kita perkirakan bahwa penilaian para konsumen terhadap barang sosial akan meningkat dengan bertambahnya pendapatan.

2. Penerapan pajak berdasarkan manfaat khusus

Meskipun pajak berdasarkan manfaat umum hanya merupakan konsep teoritis saja, tapi penerapan prinsip manfaat dalam praktek dapat ditemukan dalam beberapa contoh khusus, dimana jasa-jasa publik tertentu disediakan berdasarkan prinsip manfaat. Misalnya, pembiayaan langsung melalui tarif, pungutan (*User Charge*), ataupun bea atau jenis perpajakan yang dikeluarkan secara tidak langsung dalam bentuk *in lieu of charges* (Pengganti Pembebanan), seperti, pajak atau bahan bakar dan produk otomotif lainnya, dalam rangka pembiayaan jalan raya.

Kebijakan Perpajakan dan Kinerja Penerimaan Perpajakan di Surakarta

Dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subyek/obyek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. Melalui kebijakan ini, penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subyek pajak dan obyek pajaknya tidak berubah. Sementara itu ekstensifikasi subyek pajak/obyek pajak adalah kebijakan di ladang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak. Dua jenis kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan (Sutomo, 2003).

Fungsi Pajak dan Insiden Pajak

1. Fungsi-fungsi pajak (Wirawan Gurton, 2001:8).

a) Fungsi Penerimaan (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik sebagai sumber dana atau sarana untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila adanya sisi (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi

pemerintah, sebagai contoh, dimasukkan-nya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b) Fungsi mengatur (*regulated*), bahwa pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di dalam bidang sosial dan ekonomi.
- c) Fungsi demokrasi dari suatu pajak adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau wujud salah satu sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah.
- d) Fungsi distribusi yaitu suatu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2. Insiden pajak

Musgrave membedakan analisis insiden pajak menjadi tiga:

- a) Insiden Pajak Anggaran Berimbang (*Balanced Budget Incidence*) adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap Pengeluaran Pemerintah yang dibiayai dari penerimaan-penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Insiden pajak Anggaran Berimbang (Antara Pajak dan Pengeluaran Pemerintah) menunjukkan bagaimana biaya suatu program pemerintah didistribusikan di antara para anggota masyarakat. Kelemahan analisis insiden pajak anggaran berimbang terjadi karena kita hanya dapat menganalisis insiden pajak dari segi penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagai suatu aktivitas keseluruhan, dan kita tidak dapat menganalisis dampak distributif suatu jenis pajak terhadap suatu aktivitas pemerintah saja. Misalnya, analisis pajak anggaran berimbang tidak memungkinkan kita untuk menganalisis dampak

distributif dari pajak penghasilan atau pajak perseorangan.

- b) Insiden Pajak Absolut (*Absolute Incidence*), analisis ini hanya melihat pengaruh suatu jenis pajak (misalnya: pajak pendapatan) terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributif jenis-jenis pajak lainnya atau efek distributif dari suatu program pemerintah (Pengeluaran Pemerintah).
- c) Insiden Pajak Keseimbangan Parsial, suatu pendekatan dimana yang dianalisis adalah distribusi pendapatan yang terjadi dalam satu pasar saja sebagai akibat adanya pajak.

Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, pengeluaran pemerintah dapat bersifat "*Exhaustive*" yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Di samping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat "*Transfer*" saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (*grants*).

Jadi "*Exhaustive Expenditures*" itu mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah sedangkan "*Transfer Payments*" hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini

menentukan penggunaan dari uang tersebut. "*Exhaustive Expenditures*" ini dapat merupakan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta. Misalnya: bahan makanan, bangunan-bangunan, mesin-mesin tulis dan sebagainya dan dapat pula pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti: jasa-jasa guru, militer, pegawai negeri dan sebagainya (Suparmoko).

Pengeluaran pemerintah yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang pengeluaran (Ichwan, 1989) dalam APBN pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Pengeluaran Rutin yaitu belanja pemerintah untuk menunjang tugas-tugasnya yang sifatnya habis pakai (konsumtif dan non investasi). Walaupun anggaran belanja bersifat konsumtif tetapi anggaran rutin tidak berarti tidak diperlukan, karena ini sangat berguna untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Jadi anggaran rutin dapat meningkatkan kemampuan membangun karena pelaksana-pelaksana pembangunan tersebut juga para pelaksana kegiatan-kegiatan rutin, dan hasil kegiatan rutin sangat berguna untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan yang semakin berhasil (Suparmoko, 2000). Anggaran belanja rutin sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 1984 pasal 2 ayat 2b terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan
 - e. Subsidi dan Bantuan

- 2) Pengeluaran Pembangunan yaitu pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif berbentuk investasi (Proyek) baik berbentuk proyek fisik maupun proyek non fisik. Belanja pembangunan sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2c. Keputusan Presiden Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN intinya diperinci ke dalam sektor-sektor, kemudian tiap-tiap sektor diperinci ke dalam program-program, masing-masing program diperinci ke dalam proyek-proyek dan masing-masing proyek diperinci dalam bagian anggaran.

Pengeluaran pembangunan dibagi dalam:

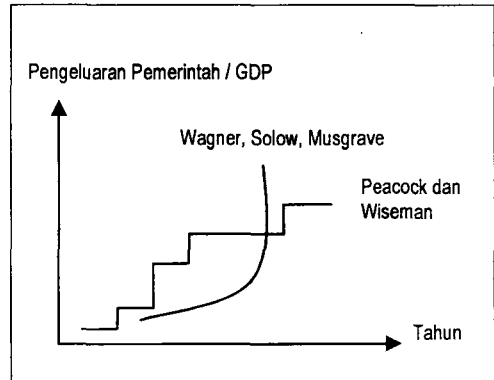
- a. Pengeluaran untuk pembiayaan departemen atau lembaga
- b. Pengeluaran pembiayaan bagi daerah
- c. Pengeluaran pembiayaan lain-lain
- d. Pengeluaran untuk bantuan proyek

Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori makro mengenai Perkembangan Pengeluaran dikemukakan para ahli ekonomi dapat digolongkan ke dalam tiga golongan (Guritno, 1994), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh *Rostow dan Musgrave* yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan ekonomi antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.



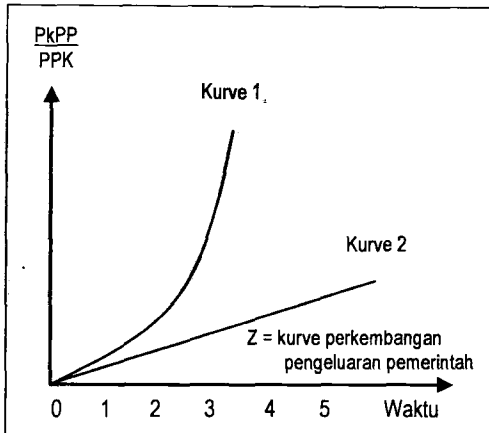
Gambar 1. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar dan banyak menimbulkan kegagalan pasar, juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang jasa dan publik dalam jumlah lebih banyak serta kualitasnya lebih baik. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit.

Musgrave berpendapat bahwa proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan investasi pemerintah terhadap GNP semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran aktiva sosial. Pandangan *Wagner* berbeda dengan perkembangan pengeluaran pemerintah versi

Peacock dan Wiseman berbentuk seperti tangga.

2. Hukum Wagner



Gambar 2. Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Wagner mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP didasarkan pengamatannya di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19.

Kelemahan Hukum Wagner, tidak didasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*Organic Theory of The State*) yang menganggap pemerintah sebagai individu bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga dari *Peacock dan*

Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. *Peacock dan Wiseman* mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran masyarakat.

Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak ini merupakan kendali bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara semena-mena.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengeluaran meningkat dari tahun ke tahun, menurut Sadono Sukirno (1984), besarnya pengeluaran pemerintah tergantung beberapa faktor yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat sosial politis antara lain:

- 1) Faktor-faktor yang bersifat ekonomis yaitu berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan cepat. Pengeluaran ini diharapkan akan menimbulkan kegairahan dari berbagai pihak terutama swasta, supaya dapat berusaha lebih giat dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tadinya mengganggu, sehingga laju pertumbuhan ekonomi lebih meningkat.

- 2) Faktor-faktor bersifat sosial politik merupakan faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, seperti memperkuat pertahanan dan keamanan, bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lain lain.

Dampak Pengeluaran Pemerintah

Dampak pengeluaran pemerintah akan mempunyai implikasi terhadap kegiatan perekonomian dan memberi insentif pada bidang lainnya, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan menambah pendapatan, diharapkan dari pengeluaran-pengeluaran pemerintah ini akan membawa dampak yang positif di dalam perekonomian secara menyeluruh, seperti yang dikutip dari Maulidiyah dan Wahyudi (2001: 178-179), Ada beberapa pakar yang memberikan klasifikasi mengenai akibat pengeluaran pemerintah yaitu:

- 1) Sahni (1972), menyatakan dalam melaksanakan pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada agar tercapai efisiensi di dalam perekonomian. Dalam perencanaan pengeluaran anggaran dilakukan sedemikian rupa, sehingga tercapai hasil yang diharapkan serta kejelasan kebijakan terhadap suatu yang dicapai di masa mendatang.
- 2) John due (1968) dan Larasati (1986) menerangkan pengaruh pengeluaran pemerintah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi stabilitas ekonomi

Kebijaksanaan stabilitas ekonomi erat hubungannya dengan kebijaksanaan fiskal dan moneter. Kebijakan stabilitas ekonomi banyak digunakan oleh

pemerintah sekarang terutama dalam hubungannya dengan pajak, bermacam-macam pengeluaran pemerintah serta masalah transfer tetapi yang lebih banyak menyangkut masalah moneter dan tingkat bunga.

Menurut Devie (1972), kebijakan stabilitas secara tidak langsung mempengaruhi kemakmuran individu, hal ini sama pula dengan kebijaksanaan alokasi dan distribusi. Apabila seseorang sudah merasa mendapat manfaat dari kebijaksanaan alokasi dan distribusi maka secara tidak langsung stabilisasi ekonomi dapat dilaksanakan.

- b. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Kenaikan dalam pengeluaran pemerintah mempengaruhi permintaan hasil produksi dan terjadinya perubahan dalam jumlah maupun kualitas terhadap pelayanan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi di negara-negara sedang berkembang sebagian besar pengeluaran pemerintah ditujukan untuk *Public Investment* dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sehingga hasilnya dapat diarahkan secara keseluruhan dimana terjadinya pertumbuhan yang cepat dan semakin besar. Pembangunan yang terjadi akibat pengeluaran pemerintah memang banyak sekali sehingga hubungan antara satu faktor dengan yang lainnya kadang-kadang tidak nampak jelas, karena saling kait antarfaktor tersebut.

Dalam tulisannya pada tahun 1880-an, ahli ekonomi Jerman *Adolph Wagner* mengemukakan tentang "Hukum Peningkatan Pengeluaran Pemerintah". Ia

mengganggap, mungkin di dalam mengantisipasi kecenderungan yang menjadi kenyataan pada 50 sampai 100 tahun kemudian, bahwa perkembangan masyarakat industri modern akan meningkatkan "Tekanan atas kemajuan masyarakat" secara politis dan menghendaki peningkatan dimasukkannya "Pertimbangan Sosial". Akibatnya, perluasan yang terus menerus dari sektor pemerintah serta porsinya dalam perekonomian haruslah diperkirakan.

Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa dan pengeluaran untuk transfer, sedangkan pertumbuhan pendapatan perkapita perlu diperhatikan bahwa proporsi antara barang pribadi dan barang sosial selalu berubah sesuai dengan kenaikan pendapatan perkapita dan bahwa porsi barang sosial selalu mengalami peningkatan. Maka hal ini membawa implikasi bahwa kebijakan anggaran yang efisien menghendaki adanya peningkatan rasio "Pembelian Pemerintah" (khususnya pembelian bagi kepentingan sipil) terhadap GNP.

Terjadinya peningkatan pendapatan perkapita, dilihat dari konteks sejarah biasanya seiring dengan perkembangan perekonomian dari suatu negara agraris dan berpendapatan rendah ke suatu negara industri dan berpendapatan tinggi.

Hubungan Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah

Sejak tahun 1975, pemerintah Indonesia mengandalkan penerimaannya dari sektor

migas, yang mendominasi sekitar 53 sampai 70 persen dari seluruh penerimaan pemerintah pada periode 1980/1981-1985/1986. Hal ini bisa terjadi, karena sejak tahun 1974 harga minyak di pasar internasional selalu mengalami kenaikan, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1981, sebesar 31 dollar per barrel (*all boom*). Setelah periode itu, harga merosot menjadi 28 dollar per barrel (1985), dan terendah terjadi tahun 1986, sampai tingkat 9,83 dollar per barrel.

Kronologi penerimaan pemerintah pada periode 1980-1985 terlihat bahwa penerimaan pemerintah dari sektor pajak berkisar antara 93-77 persen dari keseluruhan penerimaan pemerintah, fluktuasi harga minyak di pasar internasional tersebut membawa dampak negatif terhadap penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah dan akhirnya mengait ke pertumbuhan ekonomi. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun menjadi hanya 2,8% dari 6,7% pada tahun sebelumnya. Dalam GBHN juga telah disebutkan, bahwa pemerintah harus melaksanakan anggaran berimbang (*Balanced Budget*), sehingga setiap kenaikan penerimaan berarti pula kenaikan pengeluaran, yang digunakan untuk membiayai aktivitas pembangunan (Guritno, 1994: 45).

Pajak digunakan sebagai sumber dana atau sarana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yaitu, Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan, dan bila ada sisi (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Sumbangan penerimaan perpajakan terhadap penerimaan dalam negeri diharapkan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat mendukung tercapainya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang berimbang, kondisi tersebut perlu disadari oleh masyarakat, khususnya para pengambil keputusan di bidang fiskal, untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil berbagai langkah kebijakan.

Studi Empiris

Guna mendukung penelitian yang akan dilakukan, terlebih dahulu penulis akan mengambil rujukan hasil penelitian dari beberapa peneliti di antaranya yang dilakukan oleh:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Alpin Hidayati (1999) mengenai “Penerimaan Asli Daerah Sendiri Beserta Pengeluaran terhadap Pembangunan Daerah Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri Tahun 1983/1984-1994/1995” dengan model regresi logaritma linier diperoleh hasil bahwa tidak semua komponen PADS mampu berperan serta bagi pengeluaran pembangunan dan pengeluaran pembangunan mampu berperan serta untuk pembangunan daerah.
- 2) Peacock dan Wiseman (1979) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi penerimaan. Logika yang dibangun mereka berangkat dari fungsi pengeluaran pemerintah yaitu, investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan penerimaan dari sektor pajak.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Rini Uswatun (2003) dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Penerimaan bukan

Pajak dan Penerimaan Pajak terhadap Pengeluaran Pemerintah”, menyatakan penerimaan bukan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah sedang variabel penerimaan pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap pengeluaran.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Agus Widarjono (2002) dengan judul “Kausalitas Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Pendekatan Kointegrasi dan ECM”. Hasil uji kausalitas ECM menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series*) tentang penerimaan pajak dan data tentang pengeluaran pemerintah dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2003. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diterbitkan oleh Statistik Ekonomi Keuangan Kota Surakarta, Badan Pusat Statistik Tahunan (BPS) Kota Surakarta, Nota Keuangan dan RAPBN/RAPBD, bacaan pustaka, dokumentasi atau publikasi dan data-data lain yang relevan.

Analisis Data

Pada data urut waktu (*Time Series*) sering terjadi hubungan korelasi lancung (*spurious*) karena masalah data yang tidak stasioner dan tidak terkointegrasi. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut:

- 1) Uji stasioneritas terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y) dan Pengeluaran

Pemerintah dengan menggunakan uji *Root Dickey-Fuller* dan *Augmented Dickey-Fuller*.

- 2) Apabila ternyata kedua variabel stasioner, maka dilanjutkan ke Uji Kausalitas Granger pada data asli. Apabila kedua data atau salah satu data tidak stasioner, maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah kedua variabel terkointegrasi atau tidak.
- 3) Apabila ternyata kedua variabel terkointegrasi, maka akan dilanjutkan Uji Kausalitas Granger pada data asli, apabila tidak terkointegrasi maka data yang tidak stasioner akan distasionerkan dengan cara pembedaan (*differencing*), baru kemudian dilakukan Uji Kausalitas Granger pada data yang stasioner.

Pengujian Kausalitas Granger diformulasikan dengan bentuk regresi sebagai berikut:

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + U_t$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^m c_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^n d_j X_{t-j} + U_t$$

dimana:

X_t = Penerimaan Pajak

Y_t = Pengeluaran Pemerintah

n, m = Jumlah Lag

U_t = Variabel Pengganggu

Apabila hasil dan uji adalah:

- 1) Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^n d_j = 0$, maka

terdapat kausalitas satu arah dari variabel Pengeluaran Pemerintah ke variabel Penerimaan Pajak.

- 2) Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$, maka

terdapat kausalitas satu arah dari variabel Penerimaan Pajak ke variabel Pengeluaran Pemerintah.

- 3) Jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^n d_j = 0$, maka

tidak terdapat hubungan antara variabel tingkat Penerimaan Pajak dan variabel Pengeluaran Pemerintah.

- 4) Jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^n d_j \neq 0$, maka

terdapat dua arah antara variabel Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah.

Definisi Operasional Variabel

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif Pemerintah. Pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang pungutannya, dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Guritno, 1994).

Pengeluaran Pemerintah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam arti luas) untuk melaksanakan kegiatan yang konkretnya berupa penggunaan barang dan jasa atau sumberdaya ekonomi dan dinyatakan dalam penggunaan uang (Sutrisno, 1989).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

1. Penerimaan pajak

Pajak yaitu suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah. Pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang pungutan-

nya, dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Guritno, 1994).

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan aktifitas pemerintah, kebutuhan akan penerimaan negara menjadi semakin mendesak. Pemerintah telah melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan adanya program ini diharapkan peningkatan Penerimaan Pajak lebih besar lagi (Guritno, 1995).

Pada awal tahun 1978, Penerimaan Pajak yang diterima oleh Pemerintah di Kota Surakarta sebesar Rp.3.133.621 milyar Rupiah bila dibandingkan dengan Tahun 1984 mengalami kenaikan menjadi Rp.7.032.548 milyar Rupiah. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari tahun 1989 sampai tahun 1995, sedangkan pada Tahun 1996-1997 Penerimaan Pajak Pemerintah di Kota Surakarta mengalami penurunan terus menerus. Penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah di Kota Surakarta yang paling tinggi terjadi pada tahun 2000 sebesar Rp.112.000.000,00 milyar Rupiah (Biro Pusat Statistik).

2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam arti seluas-luasnya) melaksanakan kegiatan yang konkretnya berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber-sumber daya ekonomi dan dinyatakan dalam penggunaan uang (Sutrisno, 1989).

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan secara rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran cicilan hutang beserta bunganya dan subsidi pemerintah dalam bentuk subsidi BBM.

Tabel 2. Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta Tahun 1978-2003 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak (TX)	Pengeluaran Pemerintah (G)
1978	3133621.	2689274.
1979	4044966.	3387843.
1980	5236794.	4600622.
1981	5896516.	5297750.
1982	6032729.	5463337.
1983	6793040.	6211703.
1984	7032548.	6494210.
1985	8359542.	7581026.
1986	10378643	9719955.
1987	11029671	10548095
1988	13574517	11925131
1989	17203440	14702533
1990	19340388	20867759
1991	21206123	21915043
1992	24073571	20579848
1993	27789923	24530349
1994	35111994	31599945
1995	47649347	38066421
1996	33247948	31774608
1997	22464108	38692808
1998	53612004	56060844
1999	10100000	56950163
2000	112000000	10100000
2001	21600000	20900000
2002	26700000	26300000
2003	35800000	35200000

Sumber : Kanwil BPS Surakarta

Pengeluaran rutin masih ditambah dengan belanja-belanja pemerintah yang tidak dimasukkan dalam pos-pos pengeluaran

tersebut. Sebelum berlakunya pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah masih dibebani dengan tambahan subsidi kepada daerah otonom. Sedangkan pengeluaran pembangunan di antaranya adalah pembangunan untuk instansi, pembangunan daerah, cadangan anggaran pembangunan dan pembiayaan lain. Namun dengan berlakunya UU otonomi daerah, pos pengeluaran pembangunan daerah diserahkan kepada masing-masing daerah.

Pada tahun 1978, Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta sebesar Rp.2.689.274 milyar Rupiah. Sedangkan pada tahun 1979 Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta mengalami kenaikan menjadi Rp.3.387.843 milyar Rupiah bila dibandingkan dengan tahun selanjutnya Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta secara terus menerus mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada tahun 1988 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.925.131 milyar Rupiah.

Pengeluaran pemerintah di Kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengeluaran pemerintah di Kota Surakarta yang paling tinggi terjadi pada tahun 1999 dengan nilai sebesar Rp.56.950.163 milyar Rupiah (BPS, berbagai edisi).

Analisis Data

1. Uji stasioneritas

Uji stasioneritas digunakan untuk mengetahui apakah data Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta telah stasioner. Pengujian ini dilakukan untuk menghindari adanya hasil regresi langsung pada data yang tidak stasioner. Pada penelitian ini uji stasioner menggunakan uji

ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) dan DF (*Dickey-Fuller*).

a) Uji stasioneritas variabel pengeluaran pemerintah (G) di Kota Surakarta

Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji DF terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah adalah stasioner. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum ditunjukkan dalam model 1.0 – 3.0 dengan nilai absolut t statistik lebih besar bila dibandingkan nilai absolut t (0,05)

Tabel 3. Hasil Uji DF Variabel Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta

Model	t Statistik	t (0,05)	AIC
Lag 0 model 1	7,705891	-1,9552	36,21194 (Min)
Lag 0 model 2	6,433884	-2,9850	36,29076
Lag 0 model 3	3,965737	-3,6027	36,34194

Sumber : Data Sekunder olahan

- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji DF (*Dickey-Fuller*) menunjukkan variabel Pengeluaran Pemerintah (G) stasioner. Stasioneritas variabel Pengeluaran Pemerintah dilihat dari nilai kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum, ditunjukkan pada Lag 0 model 1 dengan nilai absolut t statistik lebih besar 7,705891 dibandingkan nilai absolut t (0,05) sebesar 2,9850
- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) terhadap variabel Pengeluaran Pemerintah menunjukkan variabel Pengeluaran Pemerintah stasioner. Ini dapat dilihat dari nilai *Akaike*

Information Criterion (AIC) minimum yang ditunjukkan model 1.1–3.1 dengan nilai disebut t statistik lebih besar bila dibandingkan nilai absolut t (0,05) atau nilai absolut statistik tidak negatif.

Tabel 4. Hasil Uji ADF Variabel Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta

Model	t Statistik	t (0,05)	AIC
1.1	3,365259	- 1,9559	36,33941 (Min)
2.1	3,003425	- 2,9907	36,42151
3.1	2,095578	- 3,6118	36,47065

Sumber : Data Sekunder olahan

- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) menunjukkan variabel Pengeluaran Pemerintah stasioner. Stasioneritas variabel Pengeluaran Pemerintah (G) dapat dilihat dari nilai kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum. Hal ini ditunjukkan model 1 dengan nilai absolut t statistik lebih besar 3,365259 dibandingkan nilai absolut t (0,05) sebesar 1,9559.
- b) Uji stasioneritas variabel penerimaan pajak (Tx)
- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji DF (*Dickey-Fuller*) terhadap variabel Penerimaan Pajak stasioner. Ini dapat dilihat dari nilai *Akaike Information Criterion* (AIC), minimum yang ditunjukkan dalam model 1.0–3.0 dengan nilai absolut t statistik lebih besar dibandingkan nilai absolut t (0,05) atau nilai absolut t statistik tidak negatif.

Tabel 5. Hasil Uji DF Variabel Penerimaan Pajak di Kota Surakarta

Model	t Statistik	t (0,05)	AIC
1.0	7,066431	- 1,9952	36,36092 (Min)
2.0	5,830470	- 2,9850	36,44025
3.0	3,441703	- 3,6027	36,49303

Sumber : Data Sekunder olahan.

- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji DF (*Dickey-Fuller*) menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak (Tx) stasioner. Stasioneritas variabel Penerimaan Pajak dapat dilihat dari nilai kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum. Hal ini ditunjukkan pada Lag 0 model 1 dengan nilai absolut t statistik lebih besar 7,066431 dibandingkan dengan nilai absolut t (0,05) sebesar 1,9552.
- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) terhadap variabel Penerimaan Pajak menunjukkan variabel Penerimaan Pajak stasioner. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum yang ditunjukkan dalam model 1.1–3.1 dengan nilai absolut t statistik lebih besar dibandingkan nilai absolut t (0,05) atau nilai absolut t statistik tidak negatif.

Tabel 6. Hasil uji ADF Variabel Penerimaan Pajak di Kota Surakarta

Model	t Statistik	t (0,05)	AIC
1.1	5,123954	- 1,9559	36,36223 (Min)
2.1	4,679333	- 2,9907	36,43588
3.1	3,435517	- 3,6118	36,49857

Sumber : Data Sekunder olahan

- Hasil uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak stasioner. Stasioneritas variabel Penerimaan Pajak (Tx) dapat dilihat dari nilai kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum. Ini ditunjukkan model 1 Lag 1 dengan nilai absolut t statistik lebih besar 5,123954 dibandingkan nilai absolut t (0,05) sebesar 1,9559.

2. Uji kointegrasi

Uji kointegrasi digunakan untuk mengetahui apakah Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak di Kota Surakarta ada atau mempunyai hubungan stabil dalam jangka panjang. Apabila tidak terdapat kointegrasi antara variabel maka tidak terdapat keterkaitan hubungan jangka panjang.

Tabel 7. Hasil Uji DF Kointegrasi Variabel Pengeluaran Pemerintah ke Penerimaan Pajak di Kota Surakarta

Model	Lag	Nilai Kointegrasi	DF Statistik	MK CV 5 %
1	0	-0,968507	-4,3777	-3,6019
2	0	-0,968507	-4,3777	-3,6019
3	0	-0,984456	-4,5410	-4,1996

Sumber : Data Sekunder olahan

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil Uji kointegrasi variabel Pengeluaran Pemerintah ke Penerimaan Pajak berkointegrasi. Ini dapat dilihat dari Uji DF Model 1,2 dan 3 memiliki nilai *Dickey-Fuller* lebih besar dibandingkan dengan nilai *MacKinnon Critical Values* pada derajat 5%, hal ini dapat dilihat DF model 1 DF -4,3777 lebih besar dibanding dengan *MacKinnon Critical Values* -3,6019. Model 2 DF sebesar

-4,3777 lebih besar dibanding dengan *MacKinnon Critical Values* sebesar -3,6019. Sedangkan model 3 nilai DF sebesar -4,5410 lebih besar dibanding dengan nilai *MacKinnon Critical Values* sebesar -4,1996 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah ke variabel Penerimaan Pajak telah berkointegrasi pada derajat 5%.

Tabel 8. Hasil Uji ADF Kointegrasi Variabel Pengeluaran Pemerintah ke Penerimaan Pajak di Kota Surakarta

Model	Lag	Nilai Kointegrasi	ADF t Statistik	MK CV 5 %
1	1	-0,968507	-5,2201	-3,6019
2	1	-0,968507	-5,2201	-3,6019
3	1	-0,984456	-5,4536	-4,1996

Sumber : Data Sekunder olahan

Dari tabel 8 dapat diketahui, uji kointegrasi variabel Pengeluaran Pemerintah ke Penerimaan Pajak berkointegrasi. Ini dapat dilihat dari Uji ADF model 1, 2 dan 3 semuanya memiliki nilai *Augmented Dickey-Fuller* lebih besar dibandingkan nilai *MacKinnon Critical Values* pada derajat 5%, hal ini dapat dilihat ADF model 1 ADF -5,2201 lebih besar dibanding dengan *MacKinnon Critical Values* -3,6019. Pada model ke-2 ADF dengan nilai sebesar -5,2201 lebih besar dibanding nilai *MacKinnon Critical Values* sebesar -3,6019. Sedangkan model ke-3 nilai ADF nya sebesar -5,4536 lebih besar dibanding dengan nilai *MacKinnon Critical Values* sebesar -4,1996 sehingga simpulan yang dikemukakan di sini bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah ke Variabel Penerimaan Pajak berkointegrasi pada derajat 5%.

3. Uji kointegrasi antara penerimaan pajak terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Surakarta

Dari tabel 9 diketahui hasil uji kointegrasi variabel Penerimaan Pajak ke Pengeluaran Pemerintah berkointegrasi. Ini dapat dilihat dari uji DF model 1, 2 dan 3. Semuanya memiliki nilai *Dickey-Fuller* lebih besar dibanding dengan nilai *MacKinnon Critical Values* pada derajat 5%, hal ini dapat dilihat DF model 1 dengan nilai DF sebesar $-4,3817$ lebih besar dibanding dengan *MacKinnon Critical Values* sebesar $-3,6019$. Sedangkan pada model ke-3 nilai DF nya sebesar $-4,5677$ lebih besar dibanding dengan nilai *MacKinnon Critical Values* sebesar $-4,1996$. Sehingga simpulannya bahwa variabel Penerimaan Pajak ke Variabel Pengeluaran Pemerintah telah berkointegrasi pada derajat 5%.

Tabel 9. Hasil Uji DF Kointegrasi Variabel Penerimaan Pajak ke Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta

Model	Lag	Nilai Kointegrasi	DF t Statistik	MK CV 5 %
1	0	-1,021198	-4,3817	-3,6019
2	0	-1,021198	-4,3817	-3,6019
3	0	-0,993998	-4,5677	-4,1996

Sumber : Data Sekunder olahan

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa hasil uji kointegrasi Variabel Penerimaan Pajak ke Pengeluaran Pemerintah berkointegrasi. Ini dapat dilihat dari uji ADF model 1,2 dan 3. Semuanya memiliki nilai *Dickey-Fuller* lebih besar dibanding nilai *MacKinnon Critical Values* pada derajat 5%, hal tersebut dilihat ADF model 1 dengan nilai ADF sebesar $-5,0219$ lebih besar dibandingkan dengan *MacKinnon Critical*

Values sebesar $-3,6019$. Pada model ke-2 nilai ADF Sebesar $-5,0219$ lebih besar dibanding nilai *MacKinnon Critical Values* sebesar $-3,6019$. Sedangkan pada model ke-3 nilai ADF nya sebesar $-5,2234$ lebih besar dibanding nilai *MacKinnon Critical Values* sebesar $-4,1996$. Sehingga simpulannya variabel Penerimaan Pajak ke variabel Pengeluaran Pemerintah telah berkointegrasi pada derajat 5%.

Tabel 10. Hasil Uji ADF Kointegrasi Variabel Penerimaan Pajak ke Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta

Model	Lag	Nilai Kointegrasi	ADF Statistik	MK CV 5 %
1	1	-1,021198	-5,0219	-3,6019
2	1	-1,021198	-5,0219	-3,6019
3	1	-0,993998	-5,2234	-4,1996

Sumber: Data Sekunder olahan

4. Uji Kausalitas Granger

Pada penelitian ini Uji Kausalitas Granger dilakukan Lag 1 sampai dengan Lag 8 (dengan menggunakan α sebesar 0,01 dan 0,10). Hasil Uji Kausalitas Granger antara Variabel Pengeluaran Pemerintah (G) dengan Penerimaan Pajak (Tx) dapat dilihat pada tabel 11.

Nampak pada hasil Uji Kausalitas Granger, hipotesis nol Pengeluaran Pemerintah (G) tidak mempengaruhi tingkat Penerimaan Pajak (Tx), H_0 diterima yang berarti ada pola hubungan kausalitas satu arah yaitu Variabel Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Variabel Penerimaan Pajak (Tx). Sedangkan hipotesis Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx), H_0 ditolak, berarti ada pola hubungan kausalitas dua arah yaitu Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi

Tabel 11. Hasil Uji Kausalitas Granger

Lag	Keterangan	F Statistik	Probabilitas
1	Tx → G	3,17890	0,08840
	G → Tx	2,29715	0,14385
2	Tx → G	26,9719	0,0000028
	G → Tx	3,04080	0,07150
3	Tx → G	33,3295	0,00000041
	G → Tx	75,8210	0,000000011
4	Tx → G	15,6974	0,000067
	G → Tx	53,1332	0,000000063
5	Tx → G	9,21577	0,00166
	G → Tx	33,3741	0,0000063
6	Tx → G	60,9608	0,000011
	G → Tx	78,3631	0,0000046
7	Tx → G	42,6294	0,00135
	G → Tx	28,5145	0,00294
8	Tx → G	271,257	0,04693
	G → Tx	153,813	0,06228

Sumber : Data Sekunder olahan

Penerimaan Pajak (Tx) dan Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) ditunjukkan pada:

- 1) Lag 1 menunjukkan hubungan kausalitas satu arah dengan tingkat signifikansi 0,08840 kurang dari $\alpha = 0,10$ dan tingkat signifikansi 0,14385 lebih dari $\alpha = 0,10$. Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- 2) Lag 2 menunjukkan hubungan kausalitas dua arah dengan tingkat signifikansi 0,0000028 kurang dari $\alpha = 0,01$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,07150 kurang dari $\alpha = 0,10$, Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- 3) Lag 3 menunjukkan hubungan kausalitas dua arah dengan tingkat signifikan 0,00000041 dan 0,000000011 kurang dari $\alpha = 0,01$, Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- 4) Lag 4 menunjukkan hubungan kausalitas dua arah dengan tingkat signifikan 0,000067 dan 0,000000063 kurang dari $\alpha = 0,01$, Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- 5) Lag 5 menunjukkan hubungan kausalitas dua arah dengan tingkat signifikan 0,00166 dan 0,0000063 kurang dari $\alpha = 0,01$, Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- 6) Lag 6 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah dengan tingkat signifikan sebesar 0,000011 dan 0,0000046 kurang dari $\alpha = 0,01$, Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- 7) Lag 7 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah. Dengan tingkat signifikan 0,00135 dan 0,00294 kurang dari $\alpha = 0,01$, Ho ditolak dan Hi diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan

Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).

- 8) Lag 8 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah dengan tingkat signifikan 0,04693 dan 0,06228 kurang dari $\alpha = 0,10$, H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi dengan model kausalitas Granger tentang Penerimaan Pajak (Tx) dan Pengeluaran Pemerintah (G) di Kota Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Penelitian akan melihat bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah (G) stasioner pada tingkat signifikansi 5%.
- 2) Variabel Penerimaan Pajak (Tx) stasioner pada tingkat signifikansi 5%.
- 3) Variabel Pengeluaran Pemerintah (G) dan Penerimaan Pajak (Tx) telah berkointegrasi pada tingkat signifikansi 5%
- 4) Uji Kausalitas Granger

Nampak bahwa pada hasil uji kausalitas Granger hipotesis nol untuk Pengeluaran Pemerintah (G) tidak mempengaruhi tingkat Penerimaan Pajak (Tx) H_0 diterima yang berarti ada pola hubungan kausalitas satu arah yaitu Variabel Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Variabel Penerimaan Pajak (Tx). Sedangkan hipotesis untuk Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx) H_0 ditolak yang berarti ada pola hubungan kausalitas hubungan dua arah yaitu Pengeluaran

Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx) dan Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G). Hal ini ditunjukkan pada:

- a) Lag 1 menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah, dengan tingkat signifikan 0,08840 kurang dari $\alpha = 0,10$ dan tingkat signifikan 0,14385 lebih dari $\alpha = 0,10$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- b) Lag 2 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000028 kurang dari $\alpha = 0,01$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,07150 kurang dari $\alpha = 0,10$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- c) Lag 3 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikan sebesar 0,00000041 dan 0,000000011 kurang dari $\alpha = 0,01$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- d) Lag 4 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000067 dan 0,00000063 kurang dari $\alpha = 0,01$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan

Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).

- e) Lag 5 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00166 dan 0,000063 kurang dari $\alpha = 0,01$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- f) Lag 6 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000011 dan 0,000046 kurang dari $\alpha = 0,01$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- g) Lag 7 menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikan 0,00135 dan 0,00294 kurang dari $\alpha = 0,01$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).
- h) Lag 8 menunjukkan hubungan kausalitas dua arah, dengan tingkat signifikan 0,04693 dan 0,06228 kurang dari $\alpha = 0,10$. H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Penerimaan Pajak (Tx) mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah (G) dan Pengeluaran Pemerintah (G) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Tx).

Berdasarkan kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa saran:

- 1) Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menempuh intensifikasi

pemungutan pajak dan ekstensifikasi subyek/obyek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, ekstensif subyek pajak/obyek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak. Dua jenis kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan.

- 2) Dalam pengeluaran pemerintah, penggunaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan perlu ditekankan pada penghematan dan diarahkan untuk menunjang kelancaran administrasi pemerintah dan pembangunan, sehingga perlu tercapai efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pemakaiannya.
- 3) Dalam melaksanakan pengeluaran pemerintah, pemerintah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar tercapai efisiensi di dalam perekonomian. Dalam perencanaan pengeluaran anggaran dilakukan sedemikian rupa, sehingga tercapainya hasil yang diharapkan serta kejelasan kebijakan terhadap suatu yang dicapai di masa mendatang.
- 4) Penelitian selanjutnya menggunakan pengujian dengan metode lain serta menambah jumlah observasi data agar penelitian menjadi lebih valid sehingga didapatkan hasil jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh Arsyad dan Keiji Omura, (Eds), 1994; *Local Development in Indonesia*, Tokyo: Institute of Developing Economics.
- Badan Pusat Statistik, beberapa tahun edisi, *Statistik Indonesia*, Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik, beberapa tahun edisi, *Surakarta dalam Angka*, Surakarta: Kanwil BPS.
- Devas, Nick, 1989; *Financing Local Government in Indonesia*, Athens Ohio: Ohio University Press.
- Draft Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah 1998*, Jakarta: Departemen Keuangan RI
- Fisher Ronald C, 1996; *State and Local Public Finance*, New Jersey: Irwin Educations Group Inc.
- Gujarati, Damodar, 1995 *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga
- Mangkusoebroto, Guritno, 1994, *Kebijakan Publik Indonesia, Substansi dan Urgensi*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mangkusoebroto, Guritno, 1995, *Ekonomi Publik* Edisi 3, Jogjakarta: BPFU UGM.
- Maulidyah dan Wahyudi, 2001, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UMS* Vol.2. Surakarta: BPPE UMS
- Musgrave, Richard A, dan Peggy Musgrave, 1984, *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill Inc.
- Rodinelli, Dennis A, John Nellis dan Shabbir Cheema, 1983. *Dezentralization in Developing Countries, A Review of Recent Experience*, World Bank Staff, Working Papers, Washington DC.
- Sadli, M, 2001. *Diskusi Prospek Perekonomian Indonesia*, Stadium General, FE UMS Surakarta.
- Simanjuntak Robert A, 2000; *Implementasi Desentralisasi Fiskal; Problem, Prospek dan Kebijakan*, Sidang Pleno ISEI, Batam.
- Soebagiyo, Daryono, 2005, *Metpen Uji Timbal Balik (Kausalitas) dengan Metode Granger*, FE UMS.
- Suparmoko, M., 2003 *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat-daerah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta.